

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DOKUMENTASI (*E-PUBLIC*) PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DEONA AGNESIA POHAN
2103100064

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : DEONA AGNESIA POHAN
NPM : 2103100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : 02 Juli 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLI, S.H., M.M



PENGUJI II : SYAFRUDIN, S.Sos., M.H



PENGUJI III : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si (.....)



PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

„Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP, Assec. Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Ko



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **DEONA AGNESIA POHAN**
NPM : 2103100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (E-PUBLIC) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Medan, 20 Juni 2025

Pembimbing

Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si
NIDN: 0117019201

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Delan

Assoc. Prof. Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Deona Agnesia Pohan**, NPM **2103100064**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 17 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Deona Agnesia Pohan

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (*E-PUBLIC*) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Deona Agnesia Pohan
2103100064

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Public* merupakan sistem yang menghubungkan antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan media wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tindakan penerapan sistem informasi sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung, sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, dukungan anggaran, sosialisasi, dan binaan teknologi menjadikan penerapan sistem informasi publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai ini sudah dapat dikatakan Efektif. Namun dalam proses pengelolaannya terdapat sistem pelayanan informasi yang masih memakan waktu cukup lama dalam memberikan *feedback*. Hal ini menjadikan sistem informasi *E-Public* belum cukup maksimal.

Kata Kunci : *Efektivitas, Sistem Informasi Publik, E-Government*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan adanya ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (E-Public) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai”**. Yang merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang tercinta kedua orang tua **Ayahanda Pamil Pohan** dan **Ibunda Rumini** yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan dukungan penuh disetiap langkah dalam hidup saya. Dalam kesempatan ini juga penulis

ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi.
9. Kepada yang tersayang keluarga penulis Denada Yurica Pohan, S.Ak, Irsyad Kamil Sipahutar, S.M, Elsa Youlanda Pohan, Amd.Ak, Pratu Ismail Pahmi Nainggolan, Votama Agung Anugerah Pohan, Arsyah Khalisa Sipahutar, Rafandra Kazayn Sipahutar, dan Hanif Alkhalifi Nainggolan yang telah memberikan dukungan mental, dan penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Pihak Terkait di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
11. Kepada yang teristimewa Arifandi Hidayah Tanjung yang sudah memberikan dukungan penuh, semangat, yang selalu siap dalam hal apapun, membantu penulis dalam pengerjaan skripsi, dan yang mengerti perasaan penulis.
12. Untuk sahabat terdekat seperjuangan Chiqa Faradhiba Putri Montoya, Putri Yana Batubara, Ria Damia Nabila, Fariz Faturrahman yang selalu setia membantu, menemani dan juga memberikan motivasi dan dukungan dalam kondisi apapun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
13. Kepada teman-teman seperjuangan di program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU angkatan 2021.

14. Kepada diri sendiri terimakasih sudah tetap melangkah sejauh ini walau sering tidak percaya diri selalu merasa tertinggal dan terkadang berpikir untuk menyerah karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Hingga saat ini penulis sangat bangga terhadap diri sendiri karena mampu melewati hal tersebut.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak kepada penulis. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, April 2025

Penulis

Deona Agnesia Pohan
NPM 2103100064

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Efektivitas.....	7
2.2 Pengertian Pelayanan Publik	10
2.3 Pengertian Sistem.....	13
2.4 Pengertian Informasi	14
2.5 Pengertian Sistem Informasi Publik (SIP).....	16
2.6 Pengertian Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID).....	17
2.7 Pengertian <i>Electronic Public (E-Public)</i>	18
2.8 Pengertian <i>Electronic Government (E-Government)</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Kerangka Konsep	24
3.3 Definisi Konsep.....	25
3.4 Kategorisasi Penelitian	27
3.5 Narasumber	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	30
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

4.1	Hasil Penelitian	33
4.1.1	Dinas Komunikasi dan Informatika Serdang Bedagai	33
4.1.2	Visi dan Misi Diskominfo Serdang Bedagai	36
4.1.3	Struktur Organisasi Diskominfo Serdang Bedagai	37
4.1.4	Sistem Informasi Publik PPID	38
4.2	Pembahasan	46
4.2.1	Adanya hal-hal yang mendukung perkembangan <i>E-Government</i>	46
4.2.2	Adanya kemauan Pemerintah untuk mengetahui perkembangan <i>E-Gov</i>	49
4.2.3	Adanya upaya sosialisasi Pemerintah dalam menjalankan <i>E-Gov</i>	52
4.2.4	Adanya sumber daya manusia yang kompeten	55
4.2.5	Adanya infrastruktur yang memadai	58
4.2.6	Adanya manfaat yang diperoleh	60
BAB V PENUTUP		62
5.1	Simpulan	62
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep	24
Gambar 3.2. Lokasi Kantor Diskominfo Serdang Bedagai	30
Gambar 4.1. Kantor Diskominfo Serdang Bedagai	35
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Diskominfo Serdang Bedagai.....	37
Gambar 4.3. Tampilan awal SIP PPID	39
Gambar 4.4. Tampilan Fitur Daftar Informasi Publik	40
Gambar 4.5. Daftar Dokumen Informasi PPID	42
Gambar 4.6 Mekanisme Alur Pelayanan Informasi	43
Gambar 4.7. Tampilan Laporan Pelayanan Informasi	44
Gambar 4.8. Tampilan Laporan Kepuasan Masyarakat.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi pada zaman sekarang memberi dampak pada transformasi digital di sektor pemerintahan. Adanya perkembangan teknologi membuat perubahan dalam berbagai segi kehidupan yang hal ini menjadi tantangan bagi semua orang termasuk aparat pemerintahan untuk perlu menyesuaikan diri dengan perubahan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Dengan adanya transformasi ini pemerintah dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada agar mampu melakukan pelayanan masyarakat secara maksimal dalam pelayanan publik yang salah satunya adalah berupa pelayanan informasi.

Pelayanan informasi atau teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dan dilingkungan pemerintah sendiri pengguna teknologi informasi dikenal dengan sebutan *e-government*.

Secara konseptual konsep dasar dari *e-government* adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui jaringan elektronik seperti internet, telepon, komputer, dan multimedia lainnya. *E-goverment* didefinisikan sebagai pengguna teknologi informasi untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuhnya peningkatan

kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi.

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-government* bagi suatu negara antara lain dapat memperbaiki kualitas dari pelayanan pemerintahan kepada para *stakeholders* terutama terkait dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang.

Namun tuntutan yang ada pada pemerintah saat ini ialah pemerintah harus bersikap transparan dalam menyebarluaskan informasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yaitu setiap pengguna informasi dapat mengakses setiap informasi publik karena bersifat terbuka. Dalam melakukan publikasi informasi penyelenggara negara harus bersikap transparan, terbuka dan akuntabel. Maka dari itu pemerintah wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan memfasilitasi media akses untuk masyarakat.

Salah satu wujud pelaksanaan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 di Indonesia yaitu adanya badan publik yang wajib menyediakan informasi publik secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab, dan wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyimpan, menyediakan, mendokumentasikan dan melayani permintaan informasi. Dari transparansi informasi publik tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah, dan mendorong penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dari wujud pelaksanaan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 di Indonesia, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara mengeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Serdang Bedagai yang selanjutnya mengeluarkan Surat Putusan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 303 Tahun 2023 Tentang Standart Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai bentuk penyediaan informasi publik yang wajib dilakukan dengan menyediakan media aplikasi berbasis website yaitu aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Public* yang merupakan sistem yang menghubungkan antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat.

Hasil wujud pelaksanaan tersebut pemerintah pusat mengeluarkan aplikasi *e-public* untuk mempermudah kinerja badan publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan informatika di Kabupaten Serdang Bedagai serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang terjadi. Adapun permasalahan internal yaitu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID), dan Masyarakat memerlukan akses untuk menghubungkan sumber informasi dan sebagai penerima informasi. Selanjutnya permasalahan eksternal yaitu terkait dengan keterbukaan informasi publik dimana masyarakat membutuhkan informasi yang dapat di akses dengan mudah dan bersifat transparan.

Adanya aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*e-public*) menambah harapan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai untuk dapat membantu segala kebutuhan informasi dengan efisiensi waktu, biaya maupun tenaga. Tantangan yang ada pada saat ini adalah terletak pada bagaimana pejabat pengelola aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (SIP PPID) tersebut bisa memberikan pelayanan yang maksimal dengan rentan waktu yang cepat, tersedianya kualitas dan kuantitas dokumen informasi public serta *updating* data dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ke dalam aplikasi tersebut, hal ini tentu membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dengan pendidikan dan keahlian yang menunjang dalam memberikan pelayanan.

Maka dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian **Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Serdang Bedagai.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Efektivitas, Sistem, Informasi, Sistem Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID), *E-Public*, *E-Government*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Gibson dalam Afif (2018) Efektivitas merupakan pencapaian tujuan usaha bersama sehingga tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Pengorbanan yang dikeluarkan menjadi penentu tercapainya tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas digunakan untuk mengukur antara perencanaan dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Sedianingsih dalam Laksmi Dewi (2021) efektivitas adalah bagaimana anda melakukan hal yang benar (*do the right thing*), yaitu bagaimana anda mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Afwan Rahman (2015) efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Artinya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang, atau suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkatan pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Menurut Rosalina (2018) Efektif atau tidaknya suatu program sangat tergantung dari tercapai atau tidaknya sasaran-sasaran program yang telah dirumuskan, yang dapat diukur melalui beberapa kriteria/indikator tingkat efektivitas. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Makmur (2016) Indikator pengukuran efektivitas yaitu : (1) Ketepatan Penentu Waktu, waktu dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan; (2) Ketepatan Perhitungan Biaya, artinya tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut terselesaikan; (3) Ketepatan dalam Pengukuran, artinya mampu mempergunakan waktu dalam melakukan kegiatan atau tugas dengan tepat; (4) Ketepatan dalam Menentukan Pilihan, merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektivan; (5) Ketepatan Berfikir, mampu berfikir dalam berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun alam semesta yang memberi nilai positif atau negatif; (6) Ketepatan dalam Melakukan Perintah, Keberhasilan aktivitas organisasi

dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami; (7) Ketepatan dalam Menentukan Tujuan, berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis dan sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan; (8) Ketepatan Sasaran, Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu ataupun yang ditetapkan oleh organisasi sebenarnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Menurut Tangkilisan dalam Hariadi (2018) Efektivitas mampu diukur melalui 4 indikator yaitu antara lain : (1) Pencapaian Target, pencapaian target yang sesuai pada tujuan organisasi agar mampu terwujud dengan baik; (2) Kemampuan Adaptasi, bisa menyesuaikan diri pada suatu perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal organisasi; (3) Kepuasan Kerja, memberi rasa nyaman untuk hal kerja yang kedepannya meningkatkan kinerja serta bisa dirasakan pada semua kelompok organisasi; (4) Bertanggung Jawab, melaksanakan suatu tanggung jawab yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, serta dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada pekerjaannya.

Menurut Rosalina (2018) Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu : (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat

tercapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (4) Perencanaan yang matang, memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (5) Penyusunan program yang tepat, perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya. (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2.2 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Lawati dan Firdaus (2020) Pelayanan Publik adalah segala maklumat pernyataan layanan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu termaktub dalam peraturan perundang-undangan/ peraturan pemerintah maupun dokumen kebijakan strategis pemerintah yang terkait dengan kepentingan dan tuntutan masyarakat. Sedangkan menurut Dewi dan Suparno (2022) Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Hajar S dkk (2022) Pelayanan Publik pada dasarnya tidak bisa lepas dari masyarakat karena pelayanan adalah bagian dari kegiatan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. Dimana kualitas pelayanan publik dapat menjadi suatu indikator dalam mengukur kinerja pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, pelayanan publik juga menjadi tema di Negara yang perlu dicarikan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, karena melaksanakan pelayanan yang optimal tidaklah suatu hal yang mudah. Pelaksanaan pelayanan publik berkaitan dengan pembangunan suatu daerah.

Menurut Hajar, S. dkk (2022) pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantu

yang sangat diharapkan upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif.

Menurut Ali K dan Saputra A (2020) Pelayanan Publik yang optimal dapat mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab atau pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola pemerintahan desa yang dapat mewujudkan *good governance* tersebut melalui program peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Apabila tata kelola ini terwujud maka tujuan yang ditentukan dapat tercapai yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, Perwujudan *good governance* di tingkat desa adalah salah satu percepatan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Bharata dalam Dewi dan Suparno (2022) Unsur-unsur Pelayanan Publik yaitu ; (1) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*); (2) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*customer*) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan; (3) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan; (4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini

sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

2.3 Pengertian Sistem

Menurut Purwaningsih dkk (2022) Sistem merupakan rangkaian-rangkaian dari sub sistem atau unsur-unsur yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Sistem terdiri dari elemen-elemen atau unsure-unsur yang dalam kegiatannya saling terkait satu sama lain sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu saling berhubungan dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Keberadaan suatu unsur membutuhkan keberadaan unsur lain, tanpa keberadaan unsur tersebut proses menjadi terhalang dan akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi peran sistem menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan.

Menurut Izharsyah, J.R (2020) Sistem pengelolaan adalah sesuatu yang dirancang, disusun, serta dikembangkan untuk meningkatkan dan tentunya memperhatikan setiap aspek dari apa yang ingin di kelola tersebut.

Menurut Wina Sanjaya (2017) Sistem merupakan sebagai satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya yang semuanya itu sebagai satu kesatuan utuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Ciri-ciri sistem menurut Purwaningsih dkk (2022) adalah sebagai berikut (1) Memiliki tujuan, dengan begitu proses kerja sistem mengarah pada tujuan; (2) Memiliki batas, yang tujuannya membedakan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya; (3) Bersifat terbuka, karena sistem dapat dihubungkan dengan sistem yang lain sehingga menghasilkan sistem baru yang lebih besar; (4) Terdiri dari beberapa bagian yang sering disebut dengan komponen atau sub sistem; (5) Bagian-bagian dari sub sistem merupakan satu kebulatan yang utuh, sehingga bersifat “wholiam”; (6) Saling berhubungan dan ketergantungan, baik di dalam sistem maupun antara sistem dengan lingkungannya; (7) Adanya proses kegiatan transformasi yang mengubah masukan menjadi hasil, sehingga sistem pada dasarnya merupakan transformator atau processor; (8) Dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Oleh karenanya sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

2.4 Pengertian Informasi

Menurut YS Meitrinova (2022) Informasi adalah data yang ditempatkan ke dalam suatu konteks bermakna bagi penerimanya. Sedangkan menurut Gordon B. Davis dalam Agustin (2018) informasi merupakan data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai piker yang

nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan.

Menurut Miyarso (2021) Informasi merupakan suatu faktor pendukung dalam proses pengambilan keputusan agar menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Sedangkan menurut SY Lestari dkk (2016) Informasi merupakan salah satu jenis sumber daya paling utama dan merupakan kebutuhan di dalam suatu instansi pemerintahan. Menurut Sutopo dalam Habibah (2021) Informasi merupakan sebuah rekaman terhadap fenomena yang terjadi.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Informasi merupakan kumpulan daya yang terstruktur dan diolah menjadi suatu yang bermakna dan bermanfaat bagi penerima.

Menurut Habibah (2021) Informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu memiliki keakuratan atau mampu menggambarkan situasi yang terjadi secara nyata dan sama. Sifat informasi yang berkualitas juga tepat waktu dan tersedia saat diperlukan. Relevansi dan kelengkapan informasi turut dipertimbangkan yaitu harus disebarakan secara utuh dan sesuai kebutuhan.

Informasi juga terdiri dari beberapa jenis yaitu *Absolute Information*, *Substitutional Information*, *Philosophic Information*, *Subjective Information*, *Objektive Information* dan *Cultural Information*. *Absolute Information* merupakan yang tersaji dengan suatu jaminan karena berisi kenyataan sehingga tidak membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. *Substitutional Information* merupakan informasi inti yang menjadi rujukan bagi informasi-informasi lainnya. *Philosophic Information* merupakan informasi yang berisi pengetahuan

tentang berbagai hal dan kebijakan-kebijakan. *Subjective Information* merupakan informasi yang berkaitan dengan perasaan atau sisi emosional dari individu. *Objective Information* merupakan informasi yang mengarah pada karakter informasi tertentu. Sedangkan *Cultural Information* merupakan informasi yang mampu memberikan pengaruh atau tekanan terhadap suatu budaya masyarakat.

Secara umum teknologi informasi digunakan untuk mengelola, memproses, menyusun, menyimpan, hingga memanipulasi data dalam rangka menghasilkan kualitas informasi yang baik. Teknologi informasi ini sering digunakan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan atau pengambilan keputusan.

Menurut Richard Weiner dalam Habibah (2021) Teknologi Informasi adalah kombinasi komputer dan telekomunikasi dalam memproses, mengolah dan menyebarkan data. Teknologi informasi dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses dalam menangani informasi dengan meliputi sumber-sumber, saluran dan jaringan, hingga penerimaan informasi itu sendiri.

2.5 Pengertian Sistem Informasi Publik (SIP)

Menurut Ibrahim dan Maita (2017) Sistem Informasi Publik merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Publik adalah rangkaian

kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan bahasa local, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Menurut Ratminto dalam Faradila (2022) Sistem Informasi Publik adalah kombinasi antar informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan publik dalam sebuah organisasi. Juga merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan Sistem Informasi Publik (SIP) merupakan sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat publik yang menggunakan teknologi dan aktivitas manusia untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi yang relevan.

2.6 Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Menurut Aprilya dan Fadhlain (2022) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan perbaikan ilmu pengetahuan di lingkungan pemerintah.

Dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi dijelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Data dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Negara-Negara Sekitarnya. Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab mengumpulkan, melaporkan, menyimpan, memelihara, memberikan, menyampaikan, dan memberikan administrasi data informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan lembaga legislative di sekitarnya.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas kapasitas, pendokumentasian, penataan, serta penatausahaan data dalam organisasi terbuka. Mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, menyediakan informasi, mengklasifikasikan informasi, dan memberikan pelayanan informasi.

2.7 Pengertian *Electronic Public (E-Public)*

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau yang disebut dengan *E-Public* merupakan aplikasi

pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dirancang dengan *platform hybrid – offline dan online*, yang terintergrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas badan publik.

Menurut Negara B, dan Mutaminah (2015) *E-Public* merupakan informasi pelayanan publik yang bersifat elektronik. Segala sesuatu yang menyangkut pelayanan publik disediakan informasinya yang dapat diakses secara elektronik. Informasi dapat berupa prosedur, biaya atau tariff legal, tempat pelaksana, dan hal lainnya mengenai pelayanan publik.

2.8 Pengertian *Electronic Govtment (E-Govtment)*

Menurut Wirawan V (2020) *E-Government* merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*.

Menurut Silalahi dkk (2015) *E-Government* merupakan sistem sosio-teknis yang terdiri dari komponen lunak (*soft*) dan komponen keras (*hard*). Dan dapat dikatakan komponen lunak yaitu orang-orang yang terlibat dalam *e-government* sedangkan komponen keras adalah teknologi informasi yang digunakan. *E-Government* merupakan sistem informasi dimana aspek sosial dan teknologi harus dikelola dengan baik agar terhindar dari kegagalan.

Menurut Atthahara (2018) *E-government* merupakan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi

antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan *E-Government* atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, informasi, dan urusan bisnis. *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah.

Menurut Wirawan V (2020) mengatakan bahwa Pada dasarnya *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Setidaknya terdapat 4 (empat) klasifikasi hubungan bentuk baru dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini : (1) *Government to Citizens (G-to-C)*, Aplikasi *e-government* dalam tipe *G-to-C* ini merupakan aplikasi yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi untuk berinteraksi dengan masyarakat; (2) *Government to Business (G-to-B)*, Tipe *G-to-B* adalah bentuk penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan bisnis. Kalangan bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan data dan informasi dari pemerintah. Selain itu, interaksi antara kalangan bisnis dengan lembaga pemerintahan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kalangan bisnis tersebut sebagai entity yang berorientasi profit; (3) *Government to Government (G-to-G)*, Aplikasi *e-government* juga diperlukan dalam berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya (*government to government*) untuk memperlancar kerjasama, baik antar negara atau kerjasama

antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya; (4) *Government to Employees (G-to-E)*, Tipe aplikasi *G-to-E* diperuntukkan secara internal bagi para *staf* di instansi pemerintahan.

Selain itu menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: (1) *Support*, Elemen *support* adalah elemen paling penting dalam pengembangan *e-government*. Perlu dukungan atau biasa disebut *political will* dari pejabat publik agar konsep *e-government* dapat diterapkan. Tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat terlaksana. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik; (2) *Capacity*, Elemen *capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat dua sumber daya yang harus dimiliki, yaitu: Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari

kunci keberhasilan penerapan *e-government*. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan; (3) *Value*, Elemen *value* berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Dalam elemen *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya.

Pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu diantaranya: (1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; (2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; (3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara; (4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Serdang Bedagai.

Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena lingkungan secara mendalam dan lebih rinci. Penelitian terjadi agar membantu pembaca dalam mengetahui apa yang terjadi di lingkungan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan masalah-masalah mengenai program data/atau pengalaman yang dialami oleh peneliti.

Menurut Kartiwa (2015) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu dari berbagai aspek dan sasaran penelitiannya.

Menurut Amrizal D (2019) Metode deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan mendalam pada cara menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini, berdasarkan fakta-fakta yang kelihatan atau apa adanya. Dengan alasan untuk mengetahui apakah fakta yang dijadikan variabel telah berjalan dengan baik atau tidak.

3.2 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Kerangka Konsep



Sumber : Olahan Peneliti 2025

3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek. Dengan adanya konsep, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan.

Menurut Rianto Adi dalam Marrisa (2022) mengemukakan bahwa konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. Atau dapat pula dikatakan bahwa konsep adalah suatu kata atau lambang yang menggambar kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda.

1. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang, atau suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkatan pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Undang-Undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Sistem adalah rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya yang

semuanya itu sebagai satu kesatuan utuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Informasi adalah kumpulan daya yang terstruktur dan diolah menjadi suatu yang bermakna dan bermanfaat bagi penerima.
5. Sistem Informasi Publik adalah sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat publik yang menggunakan teknologi dan aktivitas manusia untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan.
6. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID)
7. *Electronic Public (E-Public)* adalah merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dirancang dengan *platform hybrid – offline dan online*, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas badan publik.
8. *Electronic Government (E-Government)* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, informasi, dan urusan bisnis. *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

1. Adanya hal-hal yang mendukung pengembangan *e-government* di Kabupaten Serdang Bedagai
2. Adanya kemauan pemerintah Serdang Bedagai untuk mengetahui sejauh mana perkembangan *e-government* di Kabupaten Serdang Bedagai
3. Adanya upaya sosialisasi pemerintah dalam menjalankan *e-government* di Kabupaten Serdang Bedagai
4. Adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang teknologi dalam menjalankan *E-government* di Kabupaten Serdang Bedagai
5. Adanya infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan *e-government* di Kabupaten Serdang Bedagai
6. Adanya manfaat yang di peroleh pemerintah dalam menjalankan *e-government* di Kabupaten Serdang Bedagai.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan penjelasan terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Serdang Bedagai. Informan atau Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : Rini Rahmayani, S.I.Kom, M.Si
 Usia : 44 Tahun
 Jabatan : Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Nama : Nurlenti Br. Purba, S.Sos, M.I.Kom
 Usia : 42 Tahun
 Jabatan :Pranata Humas Muda Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Nama : Hans Imanuel Prawira Siahaan, S.I.Kom
 Usia : 32 Tahun
 Jabatan :Pranata Humas Ahli Pertama Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Nama : Rini Aswani, ST
 Usia : 40 Tahun
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Bidang *E-Govtment*
- e. Nama : Erikh Nopendola Saragih, S.Kom
 Usia : 38 Tahun
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang *E-Govtment*

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk

memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis pengumpulan data dengan cara melalui :

a. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di implementasikan. Maka dari itu sesuai dengan tujuan penelitian teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasikan.

b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data Kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

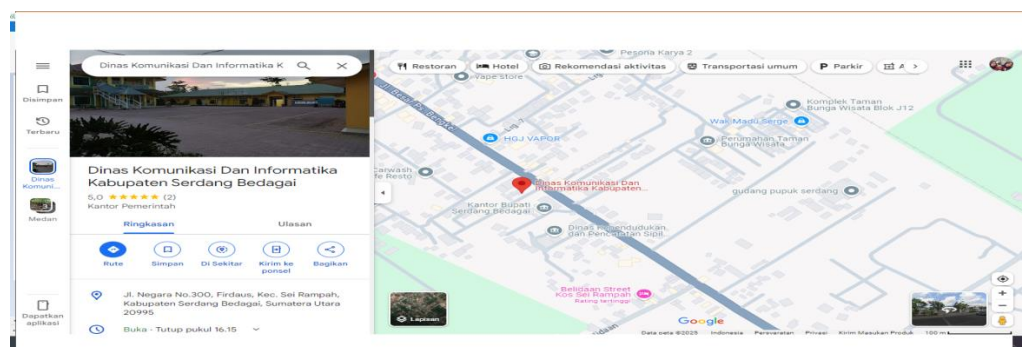
c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Data yang dirumuskan peneliti harus diuji kebenarannya, kecocokannya, dan kekokohnya. Dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih meragukan dan belum disepakati kebenarannya, oleh karena itu maka kembali keproses pengumpulan data. Tindakan validasi data ini sangat penting dalam penarikan kesimpulan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah November 2024 – Juni 2025.

Gambar 3.2. Lokasi Kantor Diskominfo Serdang Bedagai



Sumber : Google Maps

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui program *e-public* yang merupakan *website* penampung informasi yang di kelola untuk dapat di akses oleh publik. Penerapan sistem informasi publik ini dilakukan untuk dapat menghubungkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika dengan maksud untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, yang meliputi informasi terkait dengan Badan Publik. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. Untuk dapat mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan efektif setiap Badan Publik menunjuk PPID dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi berupa *e-public* secara cepat dan mudah yang sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Pengembangan sistem layanan informasi berupa *e-public* merupakan tujuan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *E-Government* yang efektif dan efisien. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada keefektifan penerapan

sistem informasi layanan publik yang dapat mewujudkan pemerintah yang *good government*.

Yang dalam penerapannya memerlukan berbagai aspek seperti dukungan dalam pengembangan sistem layanan informasi, kemauan yang besar dalam mewujudkan pemerintahan yang *good government*, adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, dengan infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan layanan informasi tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dinas ini memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, mengelola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyampaian informasi, pengaduan, serta pelayanan publik berbasis teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika di Indonesia mulai terbentuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang lebih baik. Pada awalnya pengelolaan informasi dan komunikasi di tingkat daerah dilakukan oleh berbagai instansi yang tidak terintegrasi, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi dan efektivitas dalam penyampaian informasi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika terus beradaptasi dan berinovasi. Perkembangan penting seperti penggabungan dan restrukturisasi beberapa instansi yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi menjadi satu Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika mulai focus pada implementasi *E-Government* untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Ini termasuk pengembangan portal informasi, aplikasi mobile, dan sistem pengaduan *online*. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan dan pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan aktif dalam penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan.

Dinas Komunikasi dan Informatika di berbagai daerah di Indonesia dibentuk untuk mengelola informasi dan komunikasi publik. Pembentukan umumnya berdasarkan peraturan daerah yang mengatur organisasi dan tata kerja serta dipengaruhi oleh regulasi nasional terkait pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai yang berlokasi di Jalan Negara Nomor 300, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berperan penting dalam penyebaran informasi publik dan pelayanan masyarakat.

Gambar 4.1. Kantor Dinas Kominfo Serdang Bedagai



Sumber : <https://diskominfo.serdangbedagaikab.go.id/>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta meningkatkan pembangunan infrastruktur teknologi informatika yang optimal dengan cara menyebarluaskan informasi melalui media masa, keterbukaan informasi public di OPD, penyebarluasan informasi melalui publikasi dan penerbitan, promosi potensi Kabupaten Serdang Bedagai, meningkatkan minat masyarakat di bidang Kehumasan, meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi, meningkatkan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang berbasis IT, meningkatkan pelayanan jaringan informasi dan komunikasi.

Adapun tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan bidang penyelenggaraan *E-Government*, Statistik dan Persandian. Yang berfungsi merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan

komunikasi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan dan layanan publik, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan *E-Government* dalam hal infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta layanan *E-Government*, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan *E-Government*, melaksanakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati Serdang Bedagai.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga yang berisikan pikiran-pikiran. Pikiran itu merupakan gambaran dari masa depan organisasi yang ingin dicapai. Adanya visi ini mempengaruhi suatu pandangan bahwa untuk mencapai kesuksesan harus memiliki arah yang jelas.

Adapun visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai yaitu “Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang mandiri, sejahtera dan religius”.

Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi maupun organisasi dengan tujuan bias mencapai visi

tersebut. Disamping itu misi juga diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi tersebut tetap ada.

Adapun misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, unggul, beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Serdang Bedagai



Sumber : <https://diskominfo.serdangbedagaikab.go.id/>

4.1.4 Sistem Informasi Publik PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Serdang Bedagai adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat. PPID berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal transparansi dan akuntabilitas informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelolaan informasi public yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. PPID memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang ingin mengakses data dan informasi publik. Ini termasuk menjawab permohonan informasi dan menyediakan dokumen yang diminta. PPID juga melakukan sosialisasi mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik serta memberikan edukasi tentang prosedur pengajuan permohonan informasi. PPID menyusun dan memperbarui daftar informasi publik yang tersedia sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi apa saja yang dapat diakses. PPID berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah untuk memastikan informasi yang disediakan akurat dan terkini.

Selain tugas dan fungsinya PPID juga memiliki manfaat yaitu masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kebijakan program, dan kegiatan pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi. Akses informasi yang lebih baik mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan dan pembangunan daerah. PPID membantu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil, serta memberikan informasi yang di perlukan kepada masyarakat.

Dengan demikian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyebarkan informasi publik melalui berbagai cara dan metode untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah sebuah *website* resmi yang disebut dengan *E-Public*.

Sistem Informasi Publik PPID atau *E-Public* biasanya berisi informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. *Website* ini juga menyediakan akses ke dokumen-dokumen penting dan daftar informasi public yang dapat diakses oleh masyarakat.

Gambar 4.3. Tampilan Awal SIP PPID (*E-Public*)



Sumber : <https://ppid.serdangbedagaidkab.go.id/>

Sistem Informasi Publik PPID atau *E-Public* ini memiliki beberapa fitur informasi yang efektif dan efisien serta mudah diakses. Adapun fitur-fitur

tersebut yang termasuk dalam Sistem Informasi Publik PPID atau *E-Public* adalah sebagai berikut

1. Daftar Informasi Publik

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui *website* PPID yang digunakan ini badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai dan selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.

Daftar Informasi Publik mencakup informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat.

Gambar 4.4. Tampilan Fitur Daftar Infomasi Publik



Sumber : <https://ppid.serdangbedagaikab.go.id/>

Dalam pengelolaan informasi publik terdapat beberapa kategori informasi yang penting untuk dipahami, yaitu informasi berkala, informasi serta merta, dan

informasi setiap saat. Informasi berkala adalah informasi yang disediakan secara rutin dan terjadwal oleh suatu instansi atau lembaga. Informasi ini biasanya dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Contohnya laporan tahunan tentang kinerja pemerintah daerah, bulletin bulanan yang berisi informasi tentang program-program yang sedang berjalan, dan statistic bulanan mengenai pelayanan publik.

Sedangkan informasi *serta merta* adalah informasi yang disampaikan secara langsung dan cepat kepada publik tanpa menunggu waktu tertentu. Informasi ini biasanya berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang mendesak dan memerlukan perhatian. Contohnya pengumuman tentang bencana alam atau keadaan darurat, informasi mengenai kebijakan mendesak yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan pemberitahuan tentang perubahan jadwal kegiatan yang mendesak.

Dan informasi setiap saat adalah informasi yang dapat diakses oleh public kapan saja, tanpa batasan waktu. Informasi ini biasanya tersedia secara *online* dan dapat diakses melalui berbagai *platform* seperti *website* resmi, aplikasi atau media sosial. Contohnya data dan dokumen yang tersedia di *website* resmi pemerintah, informasi tentang layanan publik yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat, dan konten yang dipublikasikan di media sosial yang dapat dilihat oleh publik setiap saat.

Di dalam Daftar Informasi Publik terdapat dokumen informasi seperti profil badan publik, program dan kegiatan, informasi kinerja, laporan keuangan, laporan dan prosedur akses informasi, pengaduan dan pelanggaran, pengadaan

barang dan jasa, informasi darurat, hasil penelitian, dan regulasi. Semua dokumen informasi tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Publik PPID atau *E-Public*.

Gambar 4.5. Daftar Dokumen Informasi PPID



Sumber : <https://ppid.serdangbedagaikab.go.id/>

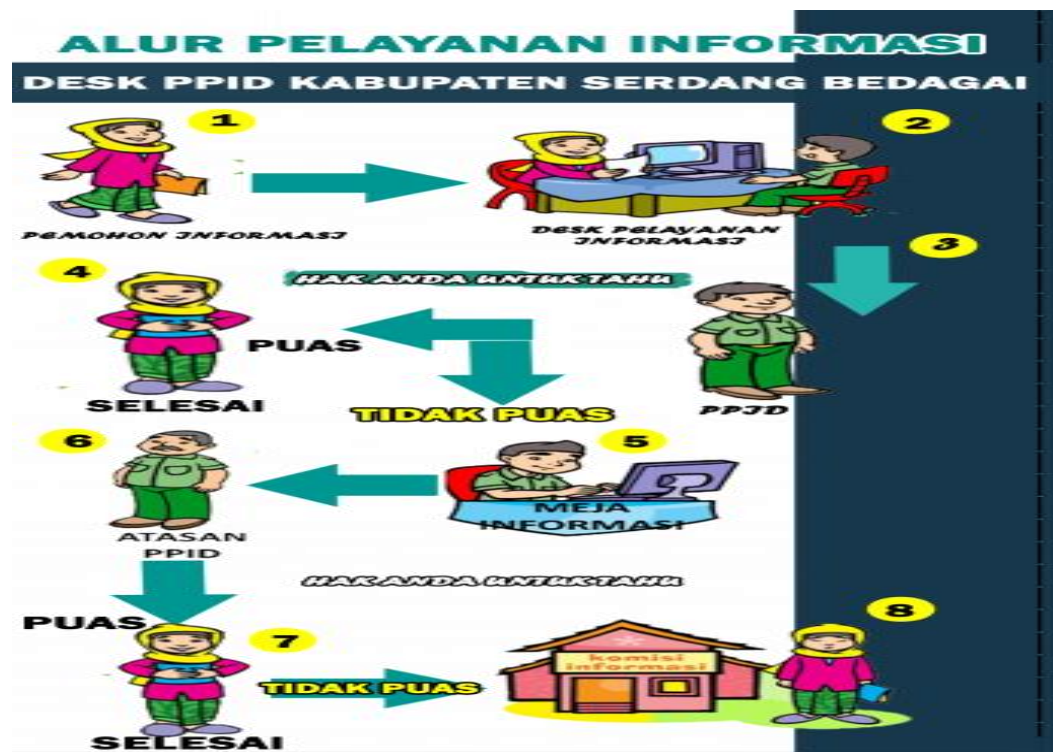
2. Permohonan Informasi

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 selalui itu setiap permohonan informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik. Melalui *website* PPID. Setiap orang dapat mengajukan permohonan informasi secara mudah. Selain tu badan publik dapat memberi respon permohonan informasi yang diajukan sesuai ketentuan Undang-Undang.

PPID menerapkan mekanisme alur pelayanan informasi yang merupakan prosedur bagi pemohon sebelum meminta informasi. Mekanisme tersebut dibuat dan di sebarakan dalam *website* resmi Dinas Komunikasi dan informatika

Kabupaten Serdang Bedagai. Adapaun alur pelayanan informasi atau mekanismenya yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.6. Mekanisme atau Alur Layanan Informasi



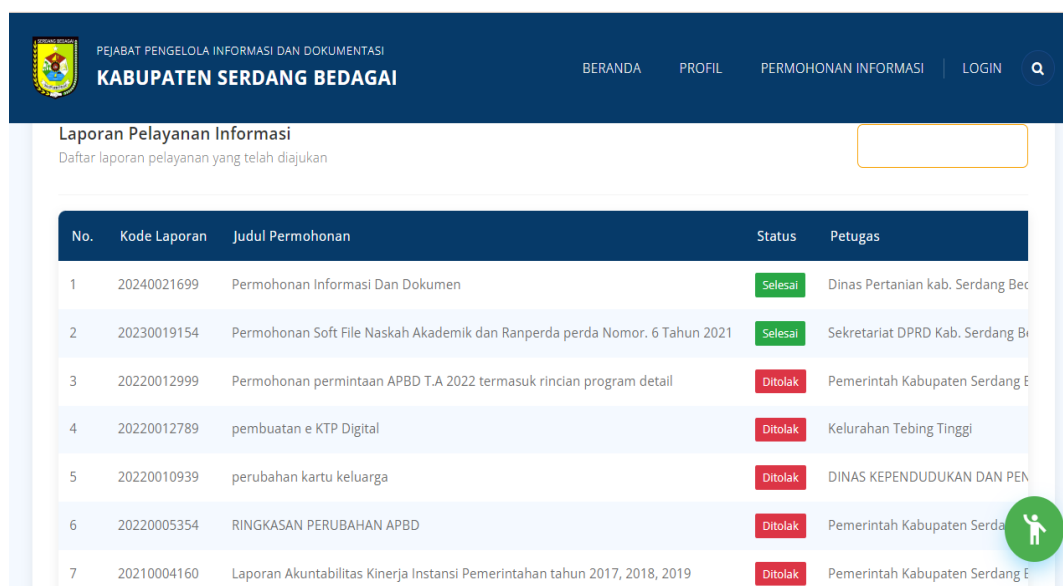
Sumber : <https://diskominfo.serdangbedagaikab.go.id/>

1. Pemohon informasi datang untuk meminta informasi
2. Petugas PPID menulis form permohonan IP dan ditandatangani oleh pemohon, meregristrasi permohonan yang sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti
3. PPID memiliki waktu 10 hari kerja untuk menjawab permohonan, 7 hari kerja tambahan apabila masih dalam proses dengan memberitahu pemohon, menginfokan kepada pemohon apabila informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan
4. Pemohon informasi mendapat informasi, jika pemohon informasi merasa tidak puas, boleh mengajukan keberatan

5. Petugas mencatat dibuku keberatan dan formulir keberatan serta menyampaikan salinan ke pemohon dan atasan PPID
6. Atasan PPID memiliki waktu 30 hari kerja untuk menjawab permohonan, menginfokan kepada pemohon apabila informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan
7. Pemohon informasi mendapatkan informasi, jika pemohon informasi merasa tidak puas, boleh mengajukan keberatan
8. Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam waktu 14 hari kerja

3. Laporan Pelayanan

Gambar 4.7. Tampilan Laporan Pelayanan Informasi



No.	Kode Laporan	Judul Permohonan	Status	Petugas
1	20240021699	Permohonan Informasi Dan Dokumen	Selesai	Dinas Pertanian kab. Serdang Bec
2	20230019154	Permohonan Soft File Naskah Akademik dan Ranperda perda Nomor. 6 Tahun 2021	Selesai	Sekretariat DPRD Kab. Serdang B
3	20220012999	Permohonan permintaan APBD T.A 2022 termasuk rincian program detail	Ditolak	Pemerintah Kabupaten Serdang E
4	20220012789	pembuatan e KTP Digital	Ditolak	Kelurahan Tebing Tinggi
5	20220010939	perubahan kartu keluarga	Ditolak	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN
6	20220005354	RINGKASAN PERUBAHAN APBD	Ditolak	Pemerintah Kabupaten Serda
7	20210004160	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2017, 2018, 2019	Ditolak	Pemerintah Kabupaten Serdang E

Sumber : <https://ppid.serdangbedagaikab.go.id/>

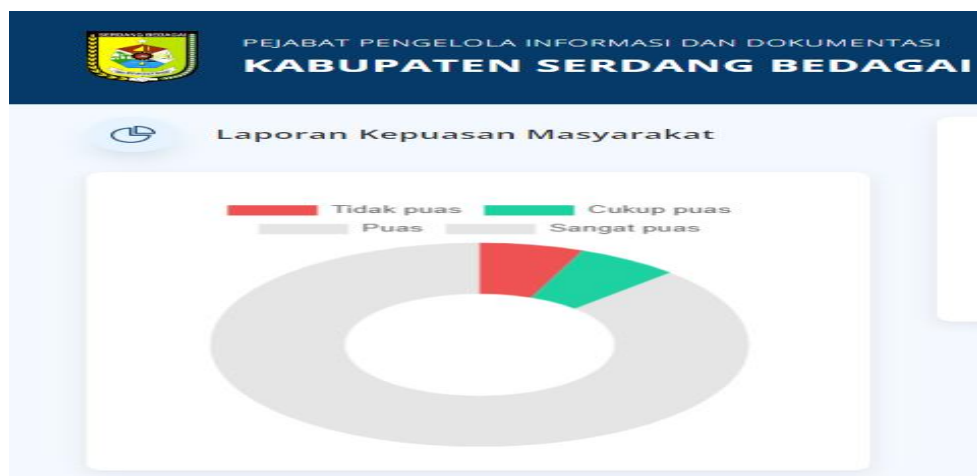
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik memiliki kewajiban membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik. Melalui *website*

PPID. Setiap aktifitas terkait pendokumentasian informasi publik serta pelayanan informasi public akan tercatat dan secara otomatis dapat dihasilkan laporan pelayanan informasi publik.

4. Layanan Kepuasan Masyarakat

Partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi, memberikan masukan dan saran untuk peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan informasi sangat dibutuhkan. Untuk itu Pemerintah Daerah mengharapkan kesediaan seluruh pemohon dan pengguna informasi public untuk dapat mengisi survey layanan kepuasan masyarakat.

Gambar 4.8. Tampilan Laporan Kepuasan Masyarakat



Sumber : <https://ppid.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Daerah mengoptimalkan keterbukaan informasi public untuk mendorong terciptanya Pemerintahan yang partisipatif. Untuk itu setiap pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasi melalui *website* PPID dapat mengisi survey kepuasan layanan untuk menilai tanggapan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Setiap input yang disampaikan masyarakat

merupakan umpan balik (*feedback*) yang sangat berarti untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi public secara berkelanjutan.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini, diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui wawancara, maupun tidak langsung melalui badan tertulis dan observasi yang dilakukan pada saat penelitian. Efektivitas penerapan sistem informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (*E-Public*) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai yang akan di analisa oleh penulis dengan menggunakan teori *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2004) tentang Elemen sukses pengembangan *E-Government* . fokus dari penelitian ini berdasarkan variable yang telah dikemukakan dalam teori yang digunakan.

4.2.1 Adanya hal yang mendukung pengembangan *E-Government* atau *E-Public*

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini biasanya dilengkapi dengan portal informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mencari dan mengakses berbagai jenis informasi, seperti dokumen, laporan, dan data statistik. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui sistem ini, yang akan di proses oleh PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SIP PPID juga menyediakan sistem manajemen dokumen yang memudahkan pengelola informasi dan dokumentasi, termasuk penyimpanan dan pengarsipan dokumen. Hal tersebut merupakan prioritas dalam

pentingnya perkembangan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* yang merupakan salah satu dari *E-Government*.

Menurut Teori *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2004) terdapat beberapa hal yang mendukung pengembangan *E-Government*. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi *E-Government* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada berbagai faktor yang saling terkait. Salah satunya adalah mekanisme dan peran pemerintah.

Mekanisme yang dilakukan dalam mendukung pengembangan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* yang merupakan salah satu dari *E-Government* mencakup serangkaian langkah dan proses yang harus diikuti untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Pemerintah perlu merumuskan rencana strategis yang jelas untuk pengembangan *E-Government*. Ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, dengan melibatkan *stakeholder* dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa rencana tersebut mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses implementasi untuk itu memerlukan evaluasi berkala terhadap kemajuan program dan hasil yang dicapai.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rini Rahmayani, S.I.Kom, M.Si selaku Kabid. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik yang menyatakan bahwa :

“Mekanisme yang dilakukan setiap OPD yang ingin melakukan pengembangan server harus memberikan permohonan ke Dinas Kominfo untuk dapat membantu pengembangan aplikasi yang OPD punya, selanjutnya pihak Kominfo akan lakukan rapat pertemuan dengan OPD pemohon tersebut, selanjutnya hasil dari rapat tersebut di evaluasi dan langsung di kembangkan oleh tenaga ahli untuk melakukan pengembangan aplikasi yang diminta.”

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung pengembangan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* yang merupakan salah satu dari *E-Government*. Peran ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan implementasi Sistem Informasi Publik atau *E-Public*. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi yang jelas dalam pengembangan *E-Government*. Pemimpin harus menginspirasi dan memotivasi pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi, mendorong inovasi dan perubahan serta menciptakan budaya yang mendukung penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung layanan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public*. Ini mencakup pembangunan jaringan internet yang cepat agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan efisien. Penganggaran yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pengembangan Sistem Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* digunakan secara efektif.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rini Rahmayani, S.I.Kom, M.Si selaku Kabid. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik yang menyatakan bahwa :

“Peran pemerintah dibidang anggaran sangat mendukung pengembangan e-gov, sdm, sarana prasarana, dan infrastruktur yang sekarang sudah di pasang wifi publik di beberapa titik blankspot.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem informasi publik atau *E-Government* di Kabupaten Serdang Bedagai secara mekanisme yang diterapkan dan peran yang dimainkan oleh pemerintah dilakukan dengan baik. Mekanisme yang tepat dan melaksanakan peran yang sesuai, pemerintah telah menciptakan sistem informasi publik yang efektif, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4.2.2 Adanya kemauan Pemerintah Daerah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan *E-Government* atau *E-Public*

Kemauan pemerintah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa inisiatif ini tidak hanya diluncurkan, tetapi juga berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan

kemauan ini adalah proses monitoring dan evaluasi yang sistematis. Monitoring mencakup pengumpulan data dan informasi tentang kinerja layanan *E-Government*, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai dampak dari layanan tersebut terhadap masyarakat. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi *E-Government*. Selain itu, pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan *stakeholder* juga merupakan bagian penting dari kemauan pemerintah untuk memahami perkembangan *E-Government*. Umpan balik ini dapat diperoleh melalui survey, forum diskusi, atau konsultasi publik yang memberikan wawasan berharga tentang pengalaman pengguna. Dengan mendengarkan suara masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dalam data dan merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Hal ini juga menciptakan rasa keterlibatan dan kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap inisiatif *E-Government*. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dari kemauan pemerintah untuk mengetahui perkembangan *E-Government*. Dengan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan program *E-Government*, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengembangan *E-Government* melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan mengelola implementasi *E-Government*. Pemerintah pusat biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan nasional dan memberikan dukungan teknis, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan lokal dan

penyesuaian layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan kedua belah pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan *E-Government* dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu pegawai pemerintah juga memainkan peran penting dalam pengembangan *E-Government*. Mereka terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi publik harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam teknologi informasi. Tanggung jawab mereka mencakup menjalankan dan memelihara sistem yang ada, serta memberikan dukungan kepada pengguna. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan teknologi dengan efektif dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rini Aswani, ST selaku Pranata Komputer Ahli Muda Bidang *E-Government* yang menyatakan bahwa :

“Yang bertanggung jawab untuk mengetahui sejauh mana perkembangan E-Gov adalah Pemerintah pusat bertanggung jawab ke daerah, dan daerah melaksanakannya. Dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap opd-opd yang terkait dengan pemakaian aplikasi tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap perkembangannya.”

Dalam pengembang *E-Government* tidak akan pernah luput dari yang namanya hambatan, jika terdapat hambatan dalam pengembangannya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi masalah dengan melakukan analisis untuk memahami penyebab hambatan yang terjadi. Ini dapat melibatkan pengumpulan data, umpan balik dari pengguna, dan evaluasi proses yang ada.

Dengan memahami akar masalah, pemerintah dapat merumuskan solusi yang lebih tepat dan efektif. Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah harus mengembangkan solusi yang sesuai. Ini bias meliputi perbaikan teknis, perubahan kebijakan, atau peningkatan pelatihan bagi pegawai pemerintah. Solusi yang tepat akan membantu mengatasi hambatan dan meningkatkan kinerja *E-Government*.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rini Aswani, ST selaku Pranata Komputer Ahli Muda Bidang *E-Government* yang menyatakan bahwa :

“Yang dilakukan Pemerintah Daerah apabila terjadi masalah atau hambatan adalah melakukan diskusi terkait hambatan, sampai hasil diskusi itu sudah ada, dan mengetahui hambatan tersebut selanjutnya di pecahkan dan diadakan evaluasi.”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kemauan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui sejauh mana perkembangan *E-Government* dalam keberhasilan sistem informasi publik ini dapat dilihat dari pihak yang bertanggung jawab dan berkontribusi mampu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi untuk mengatasi tantangan. Dengan demikian kualitas pelayanan publik di daerah meningkat dengan baik.

4.2.3 Adanya upaya sosialisasi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan *E-Government* atau *E-Public*

Upaya sosialisasi pemerintah dalam menjalankan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public*

merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan layanan yang disediakan. Sosialisasi ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi untuk layanan publik. Salah satu bentuk sosialisasi yang umum dilakukan adalah melalui kampanye informasi yang melibatkan berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan situs web resmi pemerintah. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi pemerintah dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memastikan bahwa informasi tentang layanan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* dapat diakses oleh semua lapisan yang membutuhkan informasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Erikh Nopendola Saragih, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang *E-Government* yang menyatakan bahwa :

“Upaya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kominfo dalam hal penyampaian ya melalui radio, website, melalui berita, media sosial resmi Diskominfo. Karena itu lebih memudahkan dan efektif. Dapat menjangkau seluruh lapisan yang terkait dengan informasi seperti OPD dan masyarakat.”

Proses sosialisasi ini biasanya dimulai dengan perencanaan yang matang, dimana pemerintah mengidentifikasi tujuan sosialisasi, audiens target, dan pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu, pemerintah dapat mengembangkan materi sosialisasi yang informative dan menarik, seperti brosur, video, dan infografis yang menjelaskan manfaat dan cara menggunakan layanan Sistem

Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public*. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan seminar, atau forum diskusi untuk memberikan penjelasan langsung kepada OPD terkait dan masyarakat serta menjawab pertanyaan yang mungkin timbul. Melalui interaksi langsung, masyarakat dan OPD terkait lebih memahami layanan yang tersedia.

Partisipasi dalam upaya sosialisasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* melibatkan seluruh OPD. Pemerintah sebagai penggagas dan pelaksana, memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan melaksanakan program sosialisasi. Masyarakat sebagai pengguna layanan dan OPD juga berperan penting dalam memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Keterlibatan semua pihak ini akan memperkuat upaya sosialisasi dan memastikan bahwa Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini disampaikan melalui hasil wawancara dengan bapak Erih Nopendola Saragih, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang *E-Government* yang menyatakan bahwa :

“Yang ikut bertanggung jawab dalam hal sosialisasi ini ya semua OPD ikut teribat didalam sosialisasi tersebut. Karena setiap OPD memiliki portal masing masing. Jadi setiap OPD bertanggung jawab dalam hal sosialisasi sistem informasi publik tersebut”

Dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai upaya sosialisasi pemerintah dalam menjalankan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* dapat ditarik kesimpulan

bahwa upaya sosialisasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan *E-Government* merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang layanan yang tersedia. Proses sosialisasi melibatkan analisis, pengembangan materi yang informative, dan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Dengan hal ini upaya sosialisasi dalam menjalankan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah terpenuhi.

4.2.4 Adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dalam menjalankan *E-Government* atau *E-Public*

Sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi merupakan elemen kunci dalam menjalankan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public*. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi yang mendukung layanan publik. Ini mencakup pemahaman tentang teknologi informasi, manajemen data, serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Dengan adanya sumber daya manusia yang terampil, pemerintah dapat memastikan bahwa Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* berfungsi dengan baik, aman, dan dapat diandalkan, sehingga dapat memberikan layanan yang optimal.

Dalam menangani masalah sistem dalam menjalankan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public*,

sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi harus memiliki pendekatan yang sistematis dan proaktif. Mereka perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi isu yang lebih besar. Ketika masalah muncul tim teknis harus mampu menganalisa akar penyebabnya dan merumuskan solusi yang tepat. Ini bias melibatkan perbaikan perangkat lunak, pembaruan sistem, atau peningkatan infrastruktur. Dengan pendekatan yang tepat, masalah dapat diatasi dengan cepat dan efisien, sehingga layanan *E-Government* tetap berjalan lancar.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Hans Imanuel Prawira Siahaan, S.I.Kom selaku Pranata Humas Ahli Pertama Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik beliau memberikan pernyataan bahwa :

“Ketika masalah muncul tim teknis harus mampu menganalisa akar penyebabnya dan merumuskan solusi yang tepat misalnya Jika di bagian server maka tenaga ahli server, kalau jaringan mati maka akan di cek melalui aplikasi monitor apakah di seluruh kabupaten sergei ini mati.”

Proses rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi untuk *E-Government* dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan perencanaan tenaga kerja. Pemerintah perlu menganalisis posisi yang dibutuhkan, keterampilan yang diperlukan, dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung *E-Government*. Setelah itu pemerintah dapat merumuskan deskripsi pekerjaan yang jelas dan spesifik, mencakup kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang diharapkan.

Pemerintah dapat memulai proses perekrutan dengan mempublikasikan lowongan pekerjaan melalui berbagai saluran, seperti situs web resmi, media

sosial, dan *platform* pencarian kerja. Proses seleksi biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk penilaian awal, wawancara, dan tes keterampilan teknis. Setelah proses rekrutmen selesai dan kandidat terpilih, langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut tetap kompeten dengan perkembangan teknologi terbaru.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Hans Imanuel Prawira Siahaan, S.I.Kom selaku Pranata Humas Ahli Pertama Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik beliau memberikan pernyataan bahwa :

“Proses rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan sistem informasi publik E-Government di Dinas Kominfo ini dijalankan oleh BKSDM. Namun rekrutmen tenaga ahli disebarkan melalui portal portal yang kemudian melalui proses dan wawancara”

Sasaran dari sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dalam menjalankan *E-Government* adalah untuk menciptakan sistem yang responsif, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mereka bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu dan biaya dalam penyampaian layanan publik, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu sumber daya manusia yang kompeten juga berfokus pada pengembangan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan. Dengan sasaran yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan *E-Government* yang efektif dan bermanfaat.

Dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini sangat penting untuk keberhasilan *E-Government*. Sumber daya manusia memastikan sistem informasi berjalan lancar, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan ini Dinas Kominfo Serdang Bedagai telah memastikan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan sistem pelayanan publik dengan baik.

4.2.5 Adanya infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan *E-Government* atau *E-Public*

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai adalah salah satu pilar utama dalam pengembangan *E-Government*. Ini mencakup jaringan internet yang cepat, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan. Jaringan internet adalah fondasi utama dari *E-Government*. Ketersediaan akses internet yang cepat dan stabil sangat penting untuk memastikan bahwa layanan *E-Government* dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Ini juga mendukung komunikasi yang efisien antara instansi pemerintah dan masyarakat.

Selain jaringan internet, perangkat keras juga diperlukan untuk menjalankan sistem *E-Government*. Perangkat keras (*Hardware*) yang memadai dan modern akan meningkatkan kinerja sistem *E-Government*. Server yang kuat dan handal diperlukan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Mencakup aplikasi dan sistem yang digunakan untuk mengelola dan

menyediakan layanan *E-Government* termasuk sistem manajemen informasi, portal layanan public, dan aplikasi mobile memerlukan perangkat lunak (*Software*).

Perangkat lunak yang dirancang dengan baik dan *user friendly* akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu perangkat lunak harus aman dan dapat diandalkan untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Rini Rahmayani, S.I.Kom, M.Si selaku Kabid. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik yang menyatakan bahwa :

“Untuk mendukung pengembangannya yaitu adanya infrastruktur sarana dan prasarana misalnya tower jaringan internet karena e-gov ini merupakan pusat untuk menyebarkan informasi di setiap kabupaten terutama kecamatan-kecamatan, puskesmas dan sebagainya. Peralatan, aplikasi cek jaringan, kendaraan, wifi publik. Sisi jaringan pengembangannya yaitu yang awalnya menggunakan radio sekarang beralih ke yang lebih modern. Aplikasi dikembangkan oleh tenaga ahli di OPD masing-masing, sever dikembangkan langsung atau beralih ke PDN atau pusat data nasional yang di kelola oleh kementerian komdigi pusat. Dan sejauh ini sudah memadai, aplikasi sudah lengkap dan jaringan sudah menyeluruh di kecamatan.”

Fungsi infrastruktur dalam pengembangan sistem informasi publik *E-Government* sangat beragam. Seperti jaringan komunikasi yang cepat dan andal memungkinkan transfer data yang efisien antara pemerintah dan masyarakat. Ini mencakup aksesn internet yang luas, baik melalui koneksi, kabel maupun

nirkabel, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan publik secara *online*.

Dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai infrastruktur yang mendukung perkembangan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* dapat ditarik kesimpulan bahwa infrastruktur yang baik sangat penting untuk pengembangan *E-Government*. Ini mencakup jaringan internet, *hardware*, dan *software*. Dengan infrastruktur yang memadai layanan publik bias diakses dengan mudah, kualitasnya meningkat, dan data tetap aman. Hal ini sudah diterapkan oleh Dinas Kominfo Serdang Bedagai dan dapat dikatakan infrastruktur dalam perkembangan *E-Government* sudah memadai.

4.2.6 Adanya manfaat yang di peroleh dalam menjalankan *E-Government* atau *E-Public*

Pengembangan *E-Government* memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pemerintah. Pertama, efisiensi operasional meningkat karena proses administrasi yang sebelumnya manual kini dapat dilakukan secara otomatis. Dengan sistem digital, pemerintah dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengelola layanan publik. Kedua, *E-Government* memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih baik. Dengan akses ke data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Ini juga membantu dalam perencanaan kebijakan yang lebih efektif, karena pemerintah dapat memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat dengan lebih baik. Selain

itu transparansi yang dihasilkan dari sistem *E-Government* dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, sehingga masyarakat lebih percaya pada institusi publik. Ketiga, *E-Government* juga membuka peluang untuk inovasi dalam penyampaian layanan. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru pemerintah dapat mengembangkan aplikasi dan *platform* yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Nurlenti Br. Purba, S.Sos, M.I.Kom selaku Pranata Humas Muda Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik beliau memberikan pernyataan bahwa :

“manfaat yang diperoleh pemerintah dari adanya sistem informasi publik atau E-Government ini salah satunya ialah Papperless dari segi surat menyurat, dari segi tenaga sudah tidak perlu ngantar ngantar berkas ke setiap OPD, ke Kecamatan seluruh Kabupaten Sergei, dari manual ke digital, karena sudah menjalankan E-Gov tersebut. Namun Mengalihkan orang orang yang harus melek digital itu harus perlu banyak sosialisasi yang dilakukan. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat ialah Literasi digital dan memudahkan dalam mengakses informasi”

Bagi masyarakat, pengembangan *E-Government* membawa banyak manfaat yang signifikan. Pertama, aksesibilitas layanan publik meningkat. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara *online* tanpa harus mengunjungi kantor fisik, menghemat waktu dan biaya perjalanan. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan layanan yang lebih mudah diakses, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih efisien. Kedua, *E-Government* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat dapat

dengan mudah mengakses informasi, literasi, tentang kebijakan, anggaran, dan layanan publik lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana dana publik digunakan. Dengan transparansi yang lebih besar, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif, sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga *E-Government* juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui *platform* digital, masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan publik. Ini menciptakan ruang bagi dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, sehingga suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, *E-Government* tidak hanya meningkatkan layanan, tapi juga memperkuat demokrasi dan partisipasi publik.

Dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai manfaat adanya sistem informasi publik atau *E-Government* yaitu *E-Government* di Dinas Kominfo Serdang Bedagai memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menjadi lebih efisien dan inovatif, sementara masyarakat mendapat akses yang lebih mudah ke layanan, transparansi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, ini semua memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi publik pejabat pengelola informasi dokumentasi (*e-public*) pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Perkembangan sistem informasi publik atau *E-Government* di Kabupaten Serdang Bedagai secara mekanisme yang diterapkan dan peran yang dimainkan oleh pemerintah dilakukan dengan baik. Mekanisme yang tepat dan melaksanakan peran yang sesuai, pemerintah telah menciptakan sistem informasi publik yang efektif, efisien, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Adanya kemauan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengetahui sejauh mana perkembangan *E-Government* dalam keberhasilan sistem informasi publik ini dapat dilihat dari pihak yang bertanggung jawab dan berkontribusi mampu mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi untuk mengatasi tantangan. Dengan demikian kualitas pelayanan publik di daerah meningkat dengan baik.
3. Upaya sosialisasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan *E-Government* merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman

masyarakat tentang layanan yang tersedia. Proses sosialisasi melibatkan analisis, pengembangan materi yang informative, dan penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Dengan hal ini upaya sosialisasi dalam menjalankan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) atau *E-Public* pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah terpenuhi.

4. Adanya sumber daya manusia memastikan sistem informasi berjalan lancar, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan ini Dinas Kominfo Serdang Bedagai telah memastikan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan sistem pelayanan publik dengan baik.
5. Infrastruktu yang baik sangat penting untuk pengembangan *E-Government*. Ini mencakup jaringan internet, *hardware*, dan *software*. Dengan infrastruktur yang memadai layanan publik bisa diakses dengan mudah, kualitasnya meningkat, dan data tetap aman. Hal ini sudah diterapkan oleh Dinas Kominfo Serdang Bedagai dan dapat dikatakan infrastruktur dalam perkembangan *E-Government* sudah memadai.
6. *E-Government* di Dinas Kominfo Serdang Bedagai memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menjadi lebih efisien dan inovatif, sementara masyarakat mendapat akses yang lebih mudah ke layanan, transparansi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, ini semua memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa catatan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebaiknya terus meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik. Dengan memastikan jaringan internet yang cepat dan stabil tersedia di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar semua masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah.
2. Sebaiknya adakan pelatihan rutin bagi pegawai Dinas Kominfo dan instansi terkait untuk meningkatkan keterampilan dalam pengguna teknologi dan sistem. Mengingat perkembangan zaman dalam hal teknologi tidak ada habisnya, maka pentingnya untuk meng-*update* kemampuan sumber daya manusia.
3. Dalam hal pengelolaan sistem pelayanan informasi yang masih memakan waktu lama sebaiknya PPID mengimplementasikan sistem otomatis untuk memproses permohonan informasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyimpan dan mengelola data.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Agustin, H. (2018). Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 1(1), 63-70.
- Aprilya, D., & Fadhlain, S. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(06), 752-763.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66-66.
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Dewi, P. A. P. L., Animah, A., & Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Untuk Pengelolaan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 72-86.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Faradila, S. Y. (2022). Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Melalui Sistem Informasi Perizinan Satu Pintu Kabupaten Kediri (SIMPATIK).
- Hariadi. (2005). *Strategi Manajemen*. Bayumedia Publishing.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 136-142.
- Habibah, A. F. (2021). Era Masyarakat Informasi Sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 350-363.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A.

- (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*.
- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis strategis Pemko Medan dalam melakukan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping menjadi sanitary landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 4(2), 109-117.
- Kholik, K., Sari, M. T., Hajar, S., Saputra, A., & Saragih, I. J. (2022). Dimensi Kualitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Manajemen Mutu Di Puskesmas Kota Medan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(3), 496-506.
- Kartiwa. (2015). *Birokrasi Pemerintah Daerah Pustaka Bangsa*
- Lawati, S., & Firdaus, F. (2020). Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(1), 1-7.
- Lestari, S. Y., Komariah, N., & Rizal, E. (2016). Pengelolaan Informasi Sebagai Upaya Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat. *J. Kaji. Inf. Dan Perpust*, 4(1), 59.
- Makmur. (2016). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Meitrinova, Y. S., & Samsugi, S. (2022). Sistem Informasi Pendaftaran Online Untuk Supplier Kayu Log (Bulat) Pada Pt Karya Prima Sentosa Abadi Berbasis Web Mobile. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(2).
- Miyarso, E. (2011). Peran Penting Sinematografi Dalam Pendidikan Pada Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Dinamika Pendidikan*, 18(2).
- Marissa, N. (2020). Penggunaan Metode Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Geografi. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 16-33.
- Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166-180.
- NEGARA, B., & MUTMAINNAH, N. Sistem E-Public Service Information Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Inovatif Demi. *Academia. Edu*.
- Purwaningsih, I., Oktariani, O., Hernawati, L., Wardarita, R., & Utami, P. I. (2022). Pendidikan Sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 21-26.

- Rahman, A. (2015). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 837-849.
- Rosalina, I. (2018). “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab.Madetaan. Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat, 6.
- Sanjaya, W. (2015). *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*. Kencana.
- Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep Dan Kondisi E-Government Di Indonesia. *JUPITER: Jurnal Penerapan Ilmu-Ilmu Komputer*, 1(1).
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1-16.

Sumber Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public
- Keputusan Bupati Nomor 421/18.24/Tahun 2021 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Serdang Bedagai
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Data Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Negara-Negara Sekitarnya.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Rini Rahmayani, S.I.Kom, M.Si selaku Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Ibu Nurlenti Br. Purba, S.Sos, M.I.Kom selaku Pranata Humas Muda Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik; dan Bapak Hans Imanuel Prawira Siahaan, S.I.Kom selaku Pranata Humas Ahli Pertama Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik



Wawancara dengan Ibu Rini Aswani, ST selaku Pranata Komputer Ahli Muda Bidang E-Government dan Bapak Erih Nopendola Saragih, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang E-Government.

Acc Draft wawancara
7/2/2025
Dr. Jihan Rully Sihangih, M.Si
NIDN: 0117019201

DRAFT WAWANCARA

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten Serdang Bedagai

Nama :

Umur :

Jabatan :

- A. Adanya hal-hal yang mendukung pengembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai
 1. Apa saja hal-hal yang mendukung pengembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?
 2. Bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam mendukung pengembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?
 3. Apa saja peran pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mendukung pengembangan *e-government* atau *e-public* ?
- B. Adanya kemauan pemerintah Serdang Bedagai untuk mengetahui sejauh mana perkembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai
 1. Bagaimana pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengetahui sejauh mana perkembangan *e-government* atau *e-public* ?
 2. Siapa sajakah yang bertanggungjawab untuk mengetahui sejauh mana perkembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai?
 3. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai jika perkembangan *e-government* atau *e-public* terdapat beberapa hambatan ?

C. Adanya upaya sosialisasi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan *e-government* atau *e-public*

1. Bagaimana proses upaya sosialisasi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan *e-government* atau *e-public* ?
2. Siapa sajakah yang ikut berpartisipasi dalam upaya sosialisasi menjalankan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Apakah terdapat kendala dalam upaya sosialisasi menjalankan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?

D. Adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dalam menjalankan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai

1. Bagaimana cara sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi menangani masalah sistem dalam menjalankan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan *e-government* atau *e-public* ?
3. Apa yang menjadi sasaran sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dalam menjalankan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?

E. Adanya infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai

1. Apa saja infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Bagaimana infrastruktur tersebut berfungsi dalam pengembangan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Apakah Infrastruktur yang mendukung pengembangan *e-government* atau *e-public* sudah memadai di Kabupaten Serdang Bedagai ?

- F. Adanya manfaat yang di peroleh dalam menjalankan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai
1. Apa saja manfaat yang di peroleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan *e-government* atau *e-public* ?
 2. Apa saja manfaat yang diperoleh masyarakat dalam penerapan *e-government* atau *e-public* di Kabupaten Serdang Bedagai ?

Demikianlah Draft Wawancara ini dibuat sebagai indikator dan parameter peneliti dalam mencari informasi di lapangan, yang akan di sampaikan pada pihak terkait di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan data terkait judul penelitian yaitu "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (*E-Public*) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai.

Medan, 07 Februari 2025

Hormat Saya

Peneliti



Deona Agndia Pohan
2103100064



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK-F/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 700/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -/-

Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 16 Syawal 1446 H

15 April 2025 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Serdang Bedagai

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama :

Nama mahasiswa	: DEONA AGNESIA POHAN
N P M	: 2103100064
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (E-PUBLIC) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH II, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telepon 0621 – 442135, www.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el diskominfo@serdangbedagaikab.go.id

Sei Rampah, 21 April 2025

Nomor : 18. 24 / 895.4 / 749 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin melaksanakan
Penelitian Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di- tempat

Sehubungan dengan surat saudara, Nomor : 700/KET/II.3.A.AU/UMSU-03/F/2025
tanggal 15 April 2025 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian Mahasiswa

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian
di Dinas Kominfo kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara a.n: Deona Agnesia Pohan / NPM : 210310064

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



INGAN MALEM TARIGAN, SE
Sembina Tingkat I
NIP. 19690925 198903 2 002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan M. Yamin No. 1 Medan 20238

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/AK.KP/PTD/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id fmipa@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

SK-1

PERMCHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu,
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 8 November 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Deona Agneria Pohan
NPM : 2103100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 123,0 SKS, IP Kumulatif 3,03

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (e-public) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai	Ace 8/11/2024
2	Efektivitas Fungsi Organisasi PPID dinas Kominfo dalam Transparansi Informasi di kabupaten serdang Bedagai	
3	Strategi organisasi PPID dinas Kominfo dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui informasi di kabupaten serdang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 8 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahadika S. Sor. Msp)
NIDN: 0122118301

Pemohon,

(Deona Agneria Pohan)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Dr. Jehan Ridho Izhansyah, M.S.
NIDN: 0117619207

(023) PR: Dr. Jehan Ridho Izhansyah



Bxo


UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>
fisip@umsu.ac.id
[umsu](#)
[umsu](#)
[umsu](#)
[umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2039/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Dzulhijjah 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 08 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: DEONA AGNESIA POHAN
N P M	: 2103100064
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (E-PUBLIC) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Pembimbing : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 023.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 12 Dzulhijjah 1446 H
14 November 2024 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;

Dekan,

D. KARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 6030017402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/11/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 2 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> fislip@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 7 Januari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Deana Agnesia Rhan
 N P M : 2103100064
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2029/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 08 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi Dokumentasi (e-public) Pada Dinas
Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Serdang Bedagai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

(Ananda Mahadita S.S., M.P.)
 NIDN: 0122118801

Mengetahui
 Pembimbing

(Dr. Zuhair Ridho Ikhazrah M.P.)
 NIDN: 017011201

Pemohon,

(Deana Agnesia Rhan)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 150/UND/III.3.AU/UMSU-03/IF/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 17 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	MUHAMMAD QODRI	2103100036	Dr. DEDY AMRIZAL, S.Sos., M.P.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI STAFFING DALAM PELAKSANAAN MUTASI KARYAWAN DI KANTOR REGIONAL I KEBUN SEI PUTIH (PTPN IV) KABUPATEN DELI SERDANG
12	DEONA AGNESIA POHAN	2103100064	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARISYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PELABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (E-PUBLIC) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
13	BELA SYAFITRI	2103100041	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARISYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PENERAPAN ABSENSI DIGITAL DI KANTOR KELAKSANA NEGERI MEDAN
14	PERTWI	2103100011	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARISYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI MSDM DALAM PENGELOLAAN TPA TERJUN DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MEDAN
15	DEBI WAHYUNI PUTRI	2103100051	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARISYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI PANNING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN KEPERILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-E) DI KABUPATEN SIMEULUE

Medan, 15 Rajab 1446 H
15 Januari 2025 M

(Signature)
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

UMSU
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kami melayani koreksi agar dokumen Anda lebih sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UKK/PTAK/KP/PT/00/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6627409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

Sik-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Deona Agnesia Pohan
 NPM : 2103100064
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa
 (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Publik Pejabat
 Pengelola Informasi Dokumentasi (E-Public) pada Dinas
 Komunikasi dan Informatika di Kab. Serdang Bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan / Adv / Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	7/Jan/2025	Bimbingan Proposal Penelitian Bab I, Bab II dan Bab III.	H
2.	8/Jan/2025	Bimbingan Parasi Proposal Penelitian	H
3.	8/Jan/2025	Acc Proposal Penelitian	H
4.	5/Feb/2025	Bimbingan Draft wawancara	H
5.	7/feb/2025	Acc Draft wawancara	H
6.	8/Mar/2025	Bimbingan Bab IV skripsi	H
7.	9/Mar/2025	Parasi skripsi Bab IV dan Bab V	H
8.	10/Mei/2025	Bimbingan Lampiran	H
9.	20/Juni/2025	Acc Skripsi Tugas Akhir	



De. Anton Saleh, S.Sos.
 M. SP.
 NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

Ananda Mahardika, S.Sos, M. SP.
 NIDN : 0172118801

Medan, 25 Juni 2025.

Pembimbing,

Dr. Lehan Fetho Lehasyah S. Sos. M. Si
 NIDN : 017619201



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGANPANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor: 1119UNDIII.3.AUUNSU-03F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD QODRI	2103100036	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI STAFFING DALAM PELAKSANAAN MUTASI KARYAWAN DI KANTOR REGIONAL I KEBUN SEI PUTIH (PTPN IV) KABUPATEN DELI SERDANG
2	BOBY MARTIN NUSANTARA	2103100077	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	STRATEGI PLANNING DALAM PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBINAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) KABUPATEN DELI SERDANG
3	DEONA AGNESIA POHAN	2103100064	IDA MARTINELLY, SH, MM	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (E-PUBLIC) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4	RIA DAMIA NABILA	2103100029	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH, MM	STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG MANDOR I DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN AFDELING III PT. BAS DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
5	PUTRI YANA BATUBARA	2103100006	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH, MM	FUNGSI PLANNING DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KANTOR DISDUKCAPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Notulis Sidang :

1.

Total : 7 Nilai

Medan, 05 Muharram 1447 H
30 Juni 2025M

Ketua,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris,
Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Pembina Ujian,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

QS STARS
MOA
BAPPT
QS STARS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Deona Agnesia Pohan
 Tempat & Tanggal Lahir : Padang Mahondang, 27 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Silumajang, Kec. Na IX-X, Kab. Labura
 Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Pamil Pohan
 Nama Ibu : Rumini
 Pekerjaan Ayah : Pedagang
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Silumajang, Kec. Na IX-X, Kab. Labura

Pendidikan Formal

2008 – 2014 : SD NEGERI 117503 Padang Mahondang
 2014 – 2017 : MTs. S. Alwasliyah Simpang Marbau
 2017 – 2020 : SMK SWASTA Taruna Tekno Nusantara Medan
 2021 – 2025 : S1 Ilmu Administrasi Publik, UMSU